



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POTENSI BENCANA KARHUTLA DAN KEKERINGAN AKIBAT EL NINO SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA

Nidya Waras Sayekti
Analisis Legislatif Ahli Madya
nidya.ws@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia merupakan negara dengan posisi geografis yang dipengaruhi berbagai macam atmosfer, baik di skala lokal, regional, maupun global. Fenomena atmosfer global yang terjadi dalam skala tahunan dan turut memengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia, yakni La Nina dan El Nino. La Nina terjadi ketika suhu muka laut mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal sehingga menyebabkan peningkatan curah hujan di sejumlah tempat di Indonesia. Sedangkan El Nino terjadi ketika suhu permukaan air menjadi lebih hangat sehingga berdampak penurunan curah hujan dan peningkatan kemarau yang lebih panjang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, Indonesia mengalami El Nino pada 2019, 2015, dan 2010. Pada 2019 dan 2015, El Nino cukup ekstrem sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga mencapai 1,6 juta hektar pada 2019 dan 2,6 juta hektar pada 2015. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi mengalami El Nino tahun ini setelah 3 tahun terakhir mengalami La Nina. Berdasarkan analisis anomali suhu muka laut dasarian II Mei 2023 yang dilakukan BMKG, nilai indeks Nino 3,4 atau telah mencapai plus 0,53 walaupun nilai indeks *dipole mode* masih minus 0,60. Artinya kondisi ini telah memasuki fase El Nino. BMKG memprediksi El Nino akan menguat sejak Juni hingga Desember 2023.

Fenomena El Nino yang berdampak pada menurunnya curah hujan juga akan berisiko memunculkan titik panas (*hotspot*) yang memicu karhutla. *Hotspot* ini berisiko muncul di wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan serta Kalimantan Barat. Risiko ini akan semakin meluas di semua wilayah Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua bagian selatan pada September-Oktober.

Menurut Direktur Pengendalian Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan terjadinya karhutla, antara lain deteksi dini, *monitoring area* rawan *hotspot*, pemantauan kondisi harian di lapangan dengan patroli terpadu bersama TNI dan Polri, serta pelaksanaan TMC (teknologi modifikasi cuaca) di provinsi rawan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Infrastruktur monitoring dan pengawasan yang dilakukan harus sampai ke bawah. Kolaborasi melibatkan babinsa, bhabinkamtibmas, kepala desa, korporasi, masyarakat peduli api, dan tokoh agama untuk melakukan penyadartahuan pengendalian karhutla. Salah satu upaya untuk pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan karhutla dilakukan melalui pemetaan berbasis citra satelit penginderaan jauh.

Sistem informasi karhutla dapat digunakan untuk tiga pemantauan, yakni sebelum, saat, dan setelah terjadi kebakaran. Sistem tersebut meliputi sistem peringatan dini (*early warning system/EWS*), sistem deteksi dini kebakaran (*early fire detection system*), dan sistem penilaian dampak kebakaran (*fire impact assessment system*).

BNPB juga memiliki *platform* yang bernama Inarisk yang digunakan untuk pemantauan karhutla dengan menggunakan peladen Arcgis sebagai pelayanan data yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, dan potensi kerusakan lingkungan. Namun sayangnya, platform pemantauan karhutla yang ada dari berbagai institusi masih belum terintegrasi dengan baik. Ke depan, seluruh platform ini bisa saling tukar data, terintegrasi, dan digunakan bersama sesuai dengan kewenangan institusi atau lembaga masing-masing.

Selain bencana karhutla, bencana kekeringan akibat El Nino juga mengancam lahan pertanian. Adapun puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli dan Agustus 2023. Pemerintah perlu mengantisipasi sejumlah hal, khususnya pada sektor pertanian yang berkaitan dengan menjaga ketahanan pangan. Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman El Nino. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan irigasi perpompaan. Gerakan mitigasi El Nino dilakukan melalui penggunaan pompa air di wilayah-wilayah rentan kekeringan serta mendorong percepatan tanam dengan menggunakan varietas tahan kering.

Atensi DPR

Potensi bencana karhutla dan kekeringan pada lahan pertanian akibat El Nino perlu menjadi perhatian DPR RI. Komisi V DPR RI dapat melakukan rapat kerja bersama BMKG, BPBN, KLHK, Kementan, TNI, Polri, dan BRIN untuk membahas upaya pencegahan dan penanggulangan kedua bencana tersebut. Komisi V DPR RI dapat mendorong seluruh lembaga untuk berkoordinasi dan berintegrasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana karhutla, kekeringan, serta bencana lainnya yang mungkin terjadi akibat El Nino.

Sumber

bi.go.id, 25 Mei 2023;
bisnis.com, 25 Mei 2023;
cnbcindonesia.com, 25 Mei 2023;
kompas.id, 25 Mei 2023;
republika.co.id, 25 dan 26 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023